

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alenia IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk membentuk suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian suatu negara. Tak ayal, hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi menurut Kuncoro, (2006) adalah suatu proses adanya peningkatan pendapatan perkapita suatu negara selama kurun waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses terencana yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja namun merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial atau menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari aspek materi. (Todaro, 2000)

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya (Nugraha & Maruto, 2007). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu target dalam proses pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonominya. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi pun meningkat (Dhyatmika, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 2012).

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1999) yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada suatu gambaran dalam waktu yang cukup lama dengan tidak hanya melihat

kenaikan dari pendapatan nasional namun juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk. Jadi, selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, salah satu tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi juga perlu adanya peningkatan standar hidup masyarakat (Todaro, 2000).

Antari (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dan kebijakan penggunaan dana tersebut harus transparan dan akuntabel. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dapat membangun fasilitas-fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik., karena pembangunan fasilitas dan meningkatkan pelayanan publik akan memicu pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersifat khusus.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Apabila DAK digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat

penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, contohnya kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya. Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini, dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Halim & Kusufi (2012) menyatakan bahwa APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Kusrini (2006) menyatakan bahwa peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai impleinentasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Tercermin dalam tiga kebijaksanaan pokok, yakni kebijaksanaan pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah. Penting untuk mengamati seberapa besar ketiga kebijaksanaan APBD tersebut berperan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No. 33 Tahun 2004:213)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat wajib menjaga perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah, disamping hal itu pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri berupa PAD untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Tetapi, kewenangan tersebut memiliki timbal balik berupa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik (QOMARIYAHTI, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melaksanakan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?
4. Manakah yang paling berpengaruh diantara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh diantara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat di peroleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini dan mengembangkan kekurangan pada topik penelitian ini.
3. Untuk memberi wawasan dan informasi kepada pembaca tentang mana saja yang paling berpengaruh dan paling tidak berpengaruh diantara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.